

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Henni Sukmawati

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin
DPK pada STAI DDI Sidrap.
Email: hermieny8@gmail.com

Abstract:

The quality of human resources in a region, depends not only on the efforts made by the school, but also depends on the level of community participation on education. The higher the level of community participation on education in a region, the more advanced the human resources in the area and vice versa, the lower the level of public participation towards education in a region, the more retreats of human resources in the area.

Abstrak:

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun juga tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, semakin maju SDM pada daerah tersebut dan sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, semakin mundur pula SDM pada daerah tersebut.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Pendidikan

I. PENDAHULUAN

Membangun peradaban sebuah bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan watak dan karakter manusia unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional, dan fisik yang dilandasi oleh fitrah kemanusiaan. Fitrah adalah titik tolak kemuliaan manusia, baik sebagai bawaan sese-orang sejak lahir atau sebagai hasil proses pendidikan.

Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan system pendidikan yang baik

diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan adalah salah satu unsur paling penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan proses pendewasaan diri manusia itu sendiri serta selain itu pendidikan juga merupakan proses pembentukan pribadi dan karakter manusia. Kemudian, pada satu focus yang lebih khusus yaitu pendidikan formal, manusia diberikan dasar-dasar pengetahuan sebagai pegangan dalam menjalankan hidup dan menghadapi kenyataan hidup dimana di dalam pendidikan formal dalam hal ini adalah sekolah menjadi suatu jenjang yang mungkin memang sudah selayaknya dilalui dalam proses kehidupan manusia. Kemudian dalam pendidikan sekolah itu, manusia juga selain melatih kedewasaan juga mengasah intelektualitas dan kompe-

tensinya dalam tanggung jawab dan kesadaran.

Oleh karena itu, selain sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada di lembaga pendidikan itu, maka tidak kalah pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam menunjang usaha peningkatan mutu dan kualitas pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut. Karenanya sejauhmana masyarakat berpartisipasi terhadap dunia pendidikan.

II. PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan atau peran serta seseorang dalam suatu aktivitas tertentu atau obyek tertentu. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan¹.

Partisipasi seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tergantung pada pengetahuan tentang pendidikan sehingga terlihat pada (1) pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan pendidikan, (2) reaksi terhadap pendidikan (3) sikap terhadap pendidikan yaitu perasaan terhadap penyelenggaraan pendidikan; tingkah laku yakni apa yang hendak dilakukannya terhadap penyelenggaraan pendidikan, dan keyakinan-keyakinan yang ada tentang penyelenggaraan pendidikan tersebut, dan (4) kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan tingkat partisipasi baik perseorangan maupun kelompok terhadap penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu: (1) derajat keterlibatan, mulai dari sekedar mengetahui adanya suatu usaha sampai dengan ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga, maupun materi, (2) prakarsa keterlibatan secara perseorangan atau secara kelompok,

dan (4) sikap dalam keterlibatan mulai dengan yang mendukung, setuju, sampai yang menentang.

Sampai saat ini terdapat sejumlah industri telah menaruh perhatian positif terhadap pendidikan. Perhatian itu diwujudkan dalam bentuk seperti pemberian beasiswa dan menjadi orang tua asuh.

Partisipasi masyarakat industri ini dapat didayagunakan lebih optimal dengan memberikan insentif seperti kemudahan perizinan dan pemberian penghargaan kepada dunia usaha / industri yang berperan aktif membantu dalam pendidikan. Bantuan dari dunia industri ini dapat berupa penyediaan jumlah tertentu dari anggaran pengeluarannya untuk bidang pendidikan seperti dana khusus untuk pendidikan dan atau pemberian kesempatan kepada siswa / sekolah untuk menggunakan fasilitas industri untuk kepentingan praktik².

Selain itu pondok-pondok pesantren, tempat-tempat ibadah, keluarga, lembaga adat, bahkan partai politik perlu menyadari potensi peran dan tanggung jawabnya dalam melakukan pendidikan bagi anak-anak bangsa. Apabila lebih banyak masyarakat peduli terhadap pendidikan maka pendidikan akan lebih mampu menjangkau berbagai kelompok sasaran termasuk kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (anak luar biasa).

Strategi pendayagunaan bersama sumber daya pendidikan perlu dikembangkan menjadi hubungan simbiotik antara pemerintah, politisi, penyelenggara pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM, dan yayasan-yayasan. Hubungan simbiotik ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pendidikan. Sementara itu, di kalangan stakeholders pendidikan hendaknya dikembangkan kesadaran untuk tidak mengambil keuntungan finansial semata dari pendidikan. Penyelenggara pendidikan yang mendapatkan dana dari penyelenggaraan pendidikannya perlu didorong menggunakan semua dana untuk investasi bagi peningkatan mutu pendidikan.

¹ID Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2001, hal. 10.

²*Ibid*, h.18

Hubungan simbiotik tersebut perlu difasilitasi melalui strategi sebagai berikut:

Pertama, dikembangkan wadah yang memungkinkan banyak pihak saling bertemu, berdiskusi, dan membangun komitmen bersama. Wadah tersebut berfungsi melembagakan hubungan simbiotik tersebut sehingga hubungan itu tidak hanya terjadi secara incidental, melainkan secara sinambung.

Kedua, dilakukan regulasi yang mempunyai kekuatan hukum, mengatur kewenangan dan kekuasaan pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa yang antara lain mengatur sanksi atas pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah tetap memainkan peranan yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan pada era otonomi daerah.

Ketiga, dikembangkan upaya-upaya untuk memotivasi orang tua, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan untuk menjalin hubungan sinergis dan saling menguntungkan dengan pemerintah. Bentuk wadah bersama tersebut dapat berupa organisasi formal-struktural atau organisasi informal yang lebih bersifat fungsional, misalnya untuk lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kota berbentuk Dewan Pendidikan, sedangkan untuk lingkup sekolah berbentuk Komite Sekolah.

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan

1. Bentuk partisipasi masyarakat

Permasalahan dalam pendidikan tidak mungkin diatasi hanya oleh pemerintah dan atau lembaga persekolahan. Peran serta aktif dari masyarakat (orang tua, keluarga / wali, masyarakat luas) diperlukan dalam meng-atasi persoalan pendidikan inklusif dan pelaksanaan program-program pendidikan. Partisipasi masyarakat hendaknya tidak hanya dalam pendanaan, tetapi juga

dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketene-gaan⁴.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.39/1992 pasal 4 dan dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan yaitu:⁵

- a. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah. Implikasi dari ayat 1 ini adalah diharapkan baik sekolah-sekolah negeri dan swasta dapat menyelenggarakan pendidikan.
- b. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pengajaran, pembimbingan, dan/atau pelatihan peserta didik. Dalam ayat ke 2 ini dapat dikatakan bahwa bagi orang tua yang kebetulan memiliki keahlian (profesi) dan waktu luang sebagai tenaga pengajar, diharapkan dapat membantu sebagai tenaga pengajar di kelas inklusif, baik sebagai guru kelas, guru bidang studi, maupun guru pembimbing khusus.
- c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan. Dalam ayat ini dapat dikatakan bagi orang tua yang berprofesi sebagai Dokter, Psikolog, Orthopedagog, Therapis, dan profesi lain yang relevan dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen, dan atau memberikan pembelajaran dan atau pelatihan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.
- d. Pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan

³Ibid, h. 51

⁴Mukhlisah, *Mendesak Pendidika nBerbasis Komunitas*, Jakarta: Pikiran Rakyat Cyber Media, 2002, h.105.

⁵Sidi ID, *Op.Cit.*, h. 25.

- nasional. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat menyelenggarakan antara lain pusat-pusat sumber (*resourcecenters*), pusat-pusat rehabilitasi, dan sejenisnya, yang dapat memberikan pelayanan / bimbingan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.
- e. Pengadaan dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis. Dalam ayat ini dapat berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan baik berupa dana, wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis, untuk kepentingan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan.
 - f. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan, baik berupa dana dan atau prasarana pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah.
 - g. Pengadaan dana dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Disini dapat berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan, baik berupa dana dan atau bantuan buku-buku pelajaran yang dibutuhkan serta sarana pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sekolah-sekolah.
 - h. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja. Dalam hal ini, para pengusaha dan atau masyarakat industri diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat magang dan atau latihan kerja di instansinya.
 - i. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional. Dapat diartikan bahwa masyarakat dapat melibatkan diri dalam: membantu (1) merencanakan (*planning*), (2) mengorganisasikan (*organizing*), (3) mengarahkan (*directing*), (4) mengkoordinasikan (*coordinating*), (5) mengawasi (*controlling*), dan (6) mengevaluasi (*evaluation*), penyelenggaraan sekolah-sekolah.
 - j. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/ atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan nasional. Dalam ayat ini dapat diartikan bahwa masyarakat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan/ atau pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
 - k. Pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan.
 - l. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan / atau di luar negeri. Kaitannya dengan pendidikan adalah masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam penyelenggaraan program dan atau penelitian dalam antara lain pengembangan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak asing di dalam dan/atau di luar negeri.

2. Menstimulasi partisipasi masyarakat

Kualitas sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun juga tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, semakin maju SDM pada daerah tersebut dan sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, semakin mundur pula SDM pada daerah tersebut.⁶

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan

⁶Mukhlisah, *Op.Cit*, h.56.

pendidikan di daerahnya. “Rasa ikut memiliki” sekolah hendaknya ditumbuhkan pada masyarakat di daerah sekitarnya, sehingga kualitas sekolah juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, Kepala Sekolah dan Dewan Guru.

Pemberdayaan masyarakat (perseorangan, dan kelompok seperti organisasi, yayasan, dunia usaha, dan dunia industri) dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain:

Sosialisasi tentang konsep, penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan kepada para Pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan (baik sekolah negeri maupun sekolah swasta), agar mereka memiliki persepsi yang sama. Materi yang disosialisasikan adalah Pedoman penyelenggaraan Pendidikan, yang terdiri atas 8 (delapan) buku, yaitu:

- a. Mengetahui Pendidikan.
- b. Identifikasi Anak Luar Biasa.
- c. Pengembangan Kurikulum.
- d. Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kependidikan.
- e. Pengadaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana.
- f. Kegiatan Belajar Mengajar.
- g. Manajemen Sekolah.
- h. Pemberdayaan Peranserta Masyarakat.
- i. Pemerintah memfasilitasi berbagai kegiatan sekolah yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi, antara lain:
 - 1) Pengidentifikasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus.
 - 2) Pengembangan kurikulum dan bahan ajar.
 - 3) Pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan inklusif perlu diberi insentif seperti tambahan penghasilan dan penghargaan lainnya (sertifikat, kemudahan naik pangkat, dan sebagainya).
 - 4) Pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana.
 - 5) Manajemen sekolah.

6) Kegiatan belajar mengajar dan

7) Pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah bersama sekolah mensosialisasikan kepada masyarakat (perseorangan, organisasi, yayasan, dunia usaha, dan dunia industri) baik secara lisan maupun dengan bahan tertulis (brosur dan sejenisnya), mengenai:⁷

- a. Konsep dan perlunya penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang sama mengenai pendidikan.
- b. Program-program pemerintah/sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas.

3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung pendidikan.

Meskipun proses belajar mengajar terjadi di sekolah tetapi hasil yang ingin dicapai dipenuhi oleh berbagai factor, antara lain peranserta masyarakat. Partisipasi masyarakat perlu dioptimalkan karena termarginalkan dalam system penyelenggaraan pendidikan. Marginalisasi partisipasi masyarakat terlihat pada peran yang sangat terbatas hanya BP3 saja, sekedar pada bantuan dana pendidikan. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. Akibatnya masyarakat apatis dan tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pendidikan⁸.

Kepala sekolah harus berupaya sebesar-besarnya untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan otoritas yang dimilikinya sangatlah mungkin terbangun suatu pola keikutsertaan masyarakat secara intensif dalam berbagai aktivitas kependidikan.

Bagi pengawas, kemampuan kepala sekolah/madrasah dalam menjalin hubungan

⁷Ibid.

⁸Departemen Agama RI, *Standar Supervisi Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta: 2005, h.24.

kerjasama dengan masyarakat dapat dilihat antara lain:⁹

- a. Keberadaan sekolah/madrasah cukup dikenal lingkungan dan masyarakat.
- b. Terjalin ikatan emosional antara sekolah/madrasah dengan masyarakat.
- c. Masyarakat merasa bagian dari sekolah/madrasah.
- d. Pelibatan masyarakat tidak hanya sebatas BP3 saja.
- e. Adanya pertanggungjawaban kepala sekolah/madrasah secara berkala kepada masyarakat.

4. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Kepala sekolah yang professional memiliki kemampuan kuat dalam memperdayakan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Kehadiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah merupakan wujud nyata untuk mewadahi partisipasi masyarakat. Kepala sekolah sebagai administrator sangat berkepentingan dengan kehadiran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, karena melalui merekalah partisipasi masyarakat dapat dioptimasi.

Pemerintah dan masyarakat harus mampu berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, baik dalam kerangka perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi program. Pada tataran prakarsa masyarakat, tugas-tugas semacam ini mestinya dimotori secara intensif dan ekstensif oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah¹⁰.

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dan non hierarkis yang mengandung makna bahwa secara structural para anggota tidak tunduk pada orang-orang yang menempati posisi struktur di luar dirinya. Anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah merupakan insan yang otonom yang hanya tunduk pada anggaran dasar dan kaidah-kaidah yang mereka kembangkan.

Dengan demikian, secara fungsional anggota Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah / Madrasah dapat secara riil dan leluasa memainkan kekuatannya. Mereka harus menjadi bagian integral dari skema desain dan implementasi program-program pendidikan dengan cara memainkan politik pendidikan. Secara politisi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah dapat memainkan diri dalam kerangka sosialisasi politik, transformasi politik dan penggerak politik di bidang pendidikan. Muaranya adalah, bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat mereposisi diri untuk menggeser diri dari memposisikan pembangunan politik dan ekonomi sebagai panglima ke menjadikan pembangunan SDM sebagai panglima.

Kelembagaan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah/Madrasah dibentuk dan merujuk pada Kepmendiknas No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan badan yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota. Ruang lingkup pendidikan meliputi pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah dan jalur luar sekolah. Hingga saat ini, agaknya Dewan Pendidikan belum banyak berkiprah dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, lebih-lebih untuk jalur pendidikan luar sekolah.¹¹

Dalam Kepmendiknas tersebut di atas menyebutkan mengenai tujuan, peran, dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Dilihat dari dimensi tujuan, pembentukan Dewan Pendidikan Komite Sekolah/Madrasah didasari atas tiga tujuan.

Pertama, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan. *Kedua*, meningkatkan tanggung jawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. *Ketiga*, menciptakan suasana

⁹Ibid.

¹⁰Danim, Sudarwan, Khairil. H, *Profesi Kependidikan*, Cet.I, Bandung Alfabeta, 2010, h.105

¹¹Ibid, h.106.

dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu¹².

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam pendidikan tidak mungkin diatasi hanya oleh pemerintah dan atau lembaga persekolahan. Peran serta aktif dari masyarakat (orang tua, keluarga/wali, masyarakat luas) diperlukan dalam mengatasi persoalan pendidikan inklusif dan pelaksanaan program-program pendidikan. Partisipasi masyarakat hendaknya tidak hanya dalam pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketenagaan.
2. Kualitas sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun juga tergantung pada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, semakin maju SDM pada daerah tersebut dan sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, semakin mundur pula SDM pada daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan, Khairil H, *Profesi Kependidikan*, Cet. I; Bandung, Alfabeta, 2010.
- Daryanto, M, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Departemen Agama RI, *Standar Supervisi Pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta, 2005.
- Mukhlisah, *Mendesak Pendidikan Berbasis Komunitas*, Jakarta: Pikiran Rakyat Cyber Media, 2002.
- Mukhopadhyay, Marmar, *Total Quality Management in Education (Second*

Edition), New Delhi: Sage Publication India Pvt. Ltd, 1993.

- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nawawi Hadari, *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1988.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.
- Sagala. S, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Jakarta: PT. Rakasta Samasta, 2004.
- Sidi, I. D., *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2001.
- Sahertian, Piet, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sallies, Edward, *Total Quality Manajemen in Education*, London: Kogan Page Limited, 1993.
- Satori, Djam'an, *Supervisi Akademik dan Penjaminan Mutu dalam Pendidikan persekolahan*, Makalah tidak diterbitkan, 2007.
- , *Supervisi Akademik (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Depdiknas, 2000.
- Subari, *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Perbaikan Situasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, hlm.1.
- Surya, M, *Menyambut Hari Pendidikan Nasional 2002: Menyongsong Agenda Reformasi Pendidikan*, Jakarta: Pikiran Rakyat, 2002.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Widodo, Wahono, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan IPA*, Makalah Disajikan dalam Perkuliahan "Supervisi Pendidikan IPA", tidak diterbitkan, 2007.

¹²Ibid, h.106-115.